



Rancangan Akhir

RENCANA

KERJA

2026

INSPEKTORAT

KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 telah selesai disusun. Renja ini merupakan wujud komitmen kami dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas guna meningkatkan pelayanan publik serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada.

Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini kami susun dengan berlandaskan pada hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi saat ini. Renja ini memiliki fokus utama pada peningkatan kualitas pengawasan internal, pengendalian keuangan, serta pencegahan korupsi dan penyimpangan administrasi. Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pengawas sangat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur Inspektorat melalui program pelatihan dan pengembangan. Kami juga akan terus berupaya menjalin kerjasama yang sinergis dengan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mencapai tujuan bersama.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan kepercayaan kepada Inspektorat Kabupaten Bogor. Semoga Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini dapat menjadi landasan kuat bagi upaya bersama dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih baik.

PIL. INSPEKTUR,

ARIF RAHMAN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19750723 200212 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2024	12
2.1 Capaian Kinerja Inspektorat	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	58
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	65
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja PD.....	69
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.	89
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT.....	98
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	98
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	103
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	104
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	106
BAB V PENUTUP.....	124

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	18
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2024	59
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026	72
Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	90
Tabel 3.1 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	99
Tabel 3.2 Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026	100
Tabel 3.3 Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional	102
Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026	104
Tabel 3.5 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026	105
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.....	110



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

10. Desa ...

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20 Anggaran ...

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
25. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
27. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

29. Kegiatan ...

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
30. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 merupakan pedoman rencana Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang urusan/unsur, tanggung jawab dan fungsi.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- (5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dalam SIPD.
- (6) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
- (7) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. pendanaan dan sumber pendanaan; dan
- d. dukungan terhadap prioritas nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2026

Pasal 5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 memedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, serta Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
- b. terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;

c. terjadi ...

- c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja; dan
 - d. terjadi perubahan Renstra PD;
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 7

Perubahan Renja PD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2026;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2026; dan
- c. penetapan perubahan Renja PD Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 24 Tahun 2025
TANGGAL : 7 Agustus 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain merupakan penjabaran operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026, Renja Inspektorat Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, ataupun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025-2029. Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, dengan mengusung visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang” yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; dan
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 telah menjadi bagian penting dalam substansi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, meskipun pada saat penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026, dokumen RPJMD masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Renja Inspektorat Tahun

2026 secara substansi telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan sebagaimana RPJMD Tahun 2025-2029.

Secara teknis, penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 tetap mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah adalah renja perangkat daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Nomor 30 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja perangkat daerah memuat evaluasi kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L.

Dalam penyusunannya, Renja Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan representasi dari pelaksanaan pendekatan perencanaan partisipatif, teknokratik, politis, bottom-up dan top-down yang disinergikan dengan kebijakan dan target kinerja/prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Dengan demikian, kinerja yang ditargetkan hingga akhir periode, diarahkan untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor yang mendukung target kinerja daerah, serta terakumulasi dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Secara umum, mekanisme dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 tidak mengalami perubahan, mengingat penyusunan Renja masih berpedoman pada Pasal 125-143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renja

Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Bogor yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bogor. Setelah dibentuk tim Penyusun

Renja Perangkat Daerah, selanjutnya disusun agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap persiapan penyusunan Renja Inspektorat ini dilakukan pengumpulan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2026.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Tahap penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Selain berpedoman pada dokumen Renstra, juga berpedoman pada evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan Renja

Pada tahap penyusunan Rancangan Renja ini, dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Tahun 2026 berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja PD yang selanjutnya dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah'/Lintas Perangkat Daerah. Penghitungan ulang kebutuhan wajib dan mengikat Inspektorat Kabupaten Bogor yang sudah di verifikasi oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor juga dilakukan pada tahap ini.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk perencanaan Tahun 2026 merupakan salah satu tahapan yang ditempuh oleh perangkat daerah dalam rangka membahas dan menyempurnakan substansi rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang pada awalnya berupa pendekatan teknokratik, dipadupadankan dengan usulan-usulan yang berasal dari pendekatan partisipatif, top-down dan bottom up, dengan tetap mempertimbangkan sinergi dan target prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2026. Secara vertikal. Forum Perangkat Daerah juga merupakan wadah untuk menguatkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang

mendukung pencapaian target kinerja daerah. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini merupakan bahan untuk penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Namun Dalam rangka Efisiensi anggaran sebagaimana Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk perencanaan Tahun 2026 dilaksanakan secara gabungan dengan seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja PD untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026. Pada tahap penyusunan Rancangan Akhir Renja Inspektorat ini, dilakukan kompilasi dan menyusun pemeringkatan prioritas kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan hasil Forum Perangkat Daerah.

6. Penetapan Renja

Pada tahap Penetapan Renja Perangkat Daerah ini dilakukan penajaman terhadap program, kegiatan, dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir Renja. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi Final Renja Perangkat Daerah dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Inspektorat Tahun 2026. Seluruh tahapan penyusunan Renja PD dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIPD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, melalui program dan kegiatan yang tentunya selaras dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan pula kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 telah selaras dengan rancangan akhir RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026

yang sudah memuat Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah.

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, Inspektorat mendukung Misi Ke-1 Tujuan ke 1 (satu) Kabupaten Bogor yaitu **“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan”** dengan sasaran **“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi”** dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP sebagaimana telah tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029, dan dokumen RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 yang saat ini sedang disusun secara simultan. Pencapaian target Tujuan dan Sasaran Daerah (IKU) Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029.

Tujuan Inspektorat adalah **“Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien”** dengan indikator Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, sasaran Inspektorat adalah **“Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**, dengan indikator:

1. Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah;
2. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
3. Level Kapabilitas APIP.

Oleh karena itu, dokumen Renja Inspektorat Tahun 2026 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029.

Berdasarkan keterkaitan Renja terhadap RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026, untuk mencapai sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bogor yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi, Program Prioritas Kabupaten Bogor yang diampu oleh Inspektorat adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Di samping berpedoman pada RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 dan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 juga memperhatikan Renstra Inspektorat Jenderal

Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan dengan cara menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 juga memperhatikan dan mempedomani Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat sehingga dapat bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bogor.

Keterkaitan program Inspektorat Kabupaten Bogor dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 terdapat pada prioritas pembangunan nasional (Asta Cita) ketujuh, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan”, dengan sasaran pembangunan nasional yaitu “Tercwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani”.

Sementara itu, keterkaitan program dengan prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2025 dimana program prioritas Misi Keempat “Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan prinsip *Good and Clean Governance*” adalah “Program Transformasi Birokrasi berbasis Digital dan penguatan *Good Governance*, serta Kerjasama Daerah dan Internasional. Selain itu juga memperhatikan dan mempedomani Renstra dan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Barat sehingga dapat bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bogor Kedua poin tersebut berkaitan dengan program pembangunan Kabupaten Bogor yang ada di Inspektorat Kabupaten Bogor yaitu program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 134 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.
 35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menjadi panduan bagi Inspektorat dalam merumuskan target kinerja Inspektorat yang mendukung pencapaian target kinerja daerah Tahun 2026.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat pada Tahun 2026.
3. Menjadi panduan bagi Inspektorat dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun sesuai panduan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat dan capaian Renstra Inspektorat sampai dengan tahun 2024, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, Review terhadap rancangan awal Renja Inspektorat dan Penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat serta program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Pada bab ini menjelaskan Rencana Kerja serta Pendanaan Inspektorat Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 berdasarkan Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai catatan penting yang perlu menjadi perhatian pada penyusunan Renja tahap selanjutnya, termasuk pedoman untuk penyusunan RKA tahun anggaran 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

2.1 Capaian Kinerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Sebagaimana amanat PP Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, proses evaluasi harus dilakukan pada Renja Inspektorat Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2024, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : kebijakan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

a. Evaluasi Renja Tahun 2020

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan Inspektorat Tahun 2020 adalah “Terwujudnya Pengawasan Intern Yang Efektif dan Profesional Dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Terpercaya” dengan Sasaran Inspektorat yaitu (1) Meningkatnya Level Maturitas SPIP; dan (2) Meningkatnya Level Kapabilitas APIP. Pada Tahun 2020 kedua sasaran tersebut telah memenuhi target Inspektorat yaitu masing-

masing berada pada Level 3. Pada Tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki 3 (tiga) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.692.305.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.607.774.571,00 atau 98,20%.

b. Evaluasi Renja Tahun 2021

Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 dilakukan terhadap dokumen Perubahan Renja Inspektora Tahun 2021 yang disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Sehingga berdampak terhadap perubahan Tujuan dan Sasaran Inspektorat. Adapun Tujuan Inspektorat Tahun 2021 adalah “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dengan indikator Level Maturitas SPIP. Sedangkan Sasarannya yaitu (1) Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Level Kapabilitas APIP; dan (2) Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko dengan indikator Level Maturitas Manajemen Risiko. Adapun realisasi kedua indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2021 mencapai 100% Dimana Level Kapabilitas APIP dari target Level 3 terealisasi Level 3 dan Level Maturitas Manajemen Risiko dari Target Level 1 terealisasi Level 1. Pencapaian tersebut didukung oleh 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan rata-rata capaian program, kegiatan dan sub kegiatan di atas 95% (sangat tinggi). Sedangkan dari segi anggaran, realisasi anggaran Inspektorat mencapai 98,70% dari target anggaran sebesar Rp. 32.138.230.363,00 terealisasi sebesar Rp. 31.991.809.219,00.

c. Evaluasi Renja Tahun 2022

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan Inspektorat Tahun 2022 adalah “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dengan indikator Level Maturitas SPIP. Sedangkan Sasarannya yaitu (1) Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Level Kapabilitas APIP; dan (2) Meningkatnya Maturitas Manajemen Risiko dengan indikator Level Maturitas Manajemen Risiko. Adapun realisasi kedua indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2022 dimana Level Kapabilitas APIP dari target Level 3 terealisasi Level 3 atau mencapai 100% dan Level Maturitas Manajemen Risiko dari Target Level 1 terealisasi Level 2 atau mencapai 200%. Pencapaian tersebut didukung oleh 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 50 (lima puluh) sub kegiatan

dengan rata-rata capaian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 100% (sangat tinggi). Sedangkan dari segi anggaran, realisasi anggaran Inspektorat mencapai 97,50% dari target anggaran sebesar Rp. 36.120.477.703,00 terealisasi sebesar Rp. 35.216.541.455,00.

d. Evaluasi Renja Tahun 2023

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Adapun Tujuan Inspektorat Tahun 2023 adalah “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dengan indikator Level Maturitas SPIP. Sedangkan Sasarannya yaitu (1) Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Level Kapabilitas APIP; dan (2) Meningkatkan Maturitas Manajemen Risiko dengan indikator Level Maturitas Manajemen Risiko. Adapun realisasi kedua indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2023 dimana Level Kapabilitas APIP dari target Level 3 terealisasi Level 3 atau mencapai 100% dan Level Maturitas Manajemen Risiko dari Target Level 2 terealisasi Level 2 atau mencapai 100%. Pencapaian tersebut didukung oleh 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan dengan rata-rata capaian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 100% (sangat tinggi). Sedangkan dari segi anggaran, realisasi anggaran Inspektorat mencapai 97,69% dari target anggaran sebesar Rp. 42.225.945.132,00 terealisasi sebesar Rp. 41.250.529.729,00.

e. Evaluasi Renja Tahun 2024

Adapun penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan
4. Kebijakan sekaligus unit pelaksana untuk melaksanakannya.

Tujuan strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik** dengan Sasaran strategis **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka pada tahun 2024 telah dilaksanakan 3

program, 12 kegiatan dan 50 sub kegiatan (sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) dengan pagu Belanja sebesar Rp 46,873,052,169 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Pagu anggaran ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 45.674.608.306,- (Empat Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 1.198.443.863,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan tahun 2024 sebesar Rp 45,936,374,944 (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 98,00%, dari target anggaran. Dengan Realisasi anggaran tersebut, pencapaian indikator sasaran Inspektorat yaitu “Level Maturitas Risiko” dan “Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” adalah Level 2 dari target Level 3 atau tingkat capaian 66,67%. Realisasi tujuan strategis Inspektorat pada Tahun 2024 tidak mencapai target yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.
3. Adanya Mandatory (pelimpahan tugas pengawasan) dari Pusat sehingga berdampak terhadap pergeseran jadwal PKPT.
4. Perangkat Daerah masih belum mempedomani dan menyelenggarakan SPIP secara memadai.

Upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor untuk meningkatkan Level Maturitas Risiko dan Tingkat Maturitas SPIP pada Tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan persoalan serta pemenuhan tenaga APIP dan Fungsional Umum melalui jalur seleksi umum, inpassing, perpindahan dari jabatan lain dan perpindahan dari instansi tertentu.
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana.
3. Penyusunan perubahan PKPT 2024.

4. Peningkatan pembinaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP secara memadai meliputi: sosialisasi SPIP, bimbingan teknis dan evaluasi SPI secara terjadwal.

Sementara itu, target kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bogor telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Renstra Tahun 2024-2026. Capaian masing-masing sasaran secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, realisasi sasaran Kapabilitas APIP ini sesuai dengan target yang diinginkan dimana target pada Tahun 2024 yaitu Level 3. Capaian realisasi Tahun 2024 ini sama dari realisasi pada Tahun 2022 dan 2023 dan sudah memenuhi target pencapaian pada periode akhir RPJMD Tahun 2018-2024. Jika dibandingkan dengan target nasional, berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.09.03/LHP-380/PW10/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Target Kinerja, Pelaksanaan KF 1 PKP2T Perwakilan BPKP dan Kebijakan Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 menetapkan bahwa Target APIP Nasional adalah Level 3, sehingga realisasi APIP Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun 2024 sudah "Tercapai" dengan skor 3,405 poin atau berada pada level 3.

- 2. Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bogor yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2024 salah satunya adalah pencapaian nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Pada Tahun 2024, target IEPK Kabupaten Bogor berada pada Level 2. Berdasarkan hasil penilaian dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat pada Laporan Hasil Evaluasi BPKP Nomor: PE.09.03/LHP-787/PW10/3.2/2024, realisasi nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Bogor terealisasi sebesar 2,869 poin atau berada pada level 2.

- 3. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/209/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024, realisasi sasaran Nilai SAKIP, sudah sesuai dengan target

yang diinginkan dimana target pada Tahun 2024 yaitu 17,90 poin dengan tingkat capaian 100%. Capaian realisasi Tahun 2024 ini sama dengan realisasi pada Tahun 2022 dan 2023 dan sudah memenuhi target pencapaian pada periode akhir RPJMD Tahun 2018-2024.

Rata-rata tingkat capaian kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebesar 100% sehingga dapat dilihat bahwa capaian program sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

URUSAN / UNSUR : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
01	05	01	21		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Wilayah Kerja I,II,III,IV	Persentase Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	86						
						Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Min. B	%	100						
			0001		Pengawasan Internal secara Berkala di Wilayah Kerja I,II,III,IV	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas OPD	Dok	224						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			0002		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di lingkup Desa Wilayah Kerja I,II,III,IV	Meningkatnya tertib administrasi dan Kinerja Pelaksanaan Tugas	Dok	160						
			0003		Audit Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dana Non APBD Kabupaten Bogor Wilayah Kerja I,II,III,dan IV		Dok							
			0004		Review Laporan RKPD, KUA PPAS, dan Review RKA Pemerintah Daerah Wilayah Kerja Irban I,II,III dan IV	Jumlah Laporan Review, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok	1						
			0005		Penanganan Kasus Pengaduan Lingkungan Pemerintah Daerah	Terselesaikannya Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	Kasus	30						
			0006		Penyelenggaraan Audit Khusus/Tematik	Jumlah Pengawasan/Audit Tematik	Dok	1						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							- Audit Pasos Pasum - Audit Asset								
01	05	01	23			Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Proses peningkatan akuntabilitas kinerja yang terfasilitasi	Kegiatan	5						
			0001			Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Temuan yang sudah ditindaklanjuti	Dok	3						
			0002			Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Terselesaikannya Temuan Hasil Pengawasan	Dok	2						
			0003			Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Secara Online	Terlaksananya Penilaian Birokrasi Secara Online	Dok	1						
			0004			Monitoring dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Monev Perangkat Daerah	Dok	1						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			0005		Pelatihan Pengawasan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Kapabilitas Tenaga Pengawas								
			0006		Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terarahnya Pelaksanaan Tugas Tenaga Pengawas	Dok	3						
01	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan	%	75						
						Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai	%	100						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Persentase Perencanaan sesuai target	%	100						
							Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target	%	100						
							Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100						
			0001			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayarkan	Bulan	12						
			0002			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	Dok	75						
			0003			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Tabung Pemadam Kebakaran, Tabung Gas	Bln	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			0004			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang diberi Jamuan Makanan dan Minuman	Bln	9						
			0051			Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Arsip yang ditata	Dok	3						
			0052			Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	Bln	12						
			0053			Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang dibayar, Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang tersedia	Bln	12						
			0054			Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar Pajaknya- Kendaraan Roda 4- Kendaraan roda 2	Unit	22						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			0207			Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bln	9						
			0354			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Bln	9						
			0355			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang Terpelihara	Dok	2						
			0356			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Dok	6						
			0450			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Dok	4						
			1000			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Tenaga Teknis Administrasi Perkantoran	Bln	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			1003			Pengelolaan Adminstrasi Kepagawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dok	3						
			1004			Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengiuti Pendidikan	Orang	20						
			2001			Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	2						
			2002			Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan SKPD	Dok	31						
			2003			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP dan LKPJ	Dok	3						

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2004		Penyusunan Perencanaan Anggaran	- Tersedianya Dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P '- Tersedianya Dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahunan	Dok	4						
			2005		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang tersedia	Dok	2						
			2008		Publikasi Kinerja SKPD	Publikasi Kinerja SKPD di Media	Tahun	1						
06	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%		100	100	100			
			2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen LHP yang Diterbitkan	Dokumen		665	637	894			
				01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		12	8	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		178	156	42			
				03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		6	4	2			
				04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Laporan		9	9	430			
				05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		416	416	375			
				06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		40	40	40			
				07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		4	4	4			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen LHP yang Diterbitkan	Dokumen		64	64	64			
				01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan		20	20	20			
				03		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		44	44	34			
06	01	03				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan	Dokumen		2	2	2			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan	%		100	100	100			
			2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis yang Diterbitkan	Dok		7	7	4			
				01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		5	5	3			
				02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		2	2	1			
			2.02			Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Jumlah Laporan Reviu yang Terbit	Dok		11	11	153			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				01	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD		4	4	73			
				02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		2	2	2			
				03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD		5	5	78			
06	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100	100	100			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	dok		9	12	13			
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Renstra yang Tersusun	Dok		4	3	4			
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dok		1	1	1			
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dok		1	1	1			
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dok		1	1	1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
				05		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok		1	1	1			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok		5	4	4			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok		1	1	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun dengan Baik	Dokumen		14	6	6			
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		14	14	14			
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok		49	49	49			
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok		1	1	1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok		1	1	1			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok		14	14	14			
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok		1	1	1			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN		2020	2021	2022	2023	2024		
											REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2		3		4		5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.03			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah		Dok			19	19	19			
				01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dok			4	4	4			
				06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembuatan RKBu, Pembuatan RKBu Perubahan, Pembuatan RTBU, Pembuatan RTBU Perubahan		Dok			15	15	15			
			2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan aparatur terlaksana dengan baik		Jenis Peayanan			4	4	4			
				02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia		Stel			580	91	91			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Daftar Urut Kepangkatan, Jumlah Dokumen Data APIP, Jumlah Dokumen Data Pensiun, Jumlah Dokumen DUPAK Auditor, Jumlah Dokumen DUPAK P2UPD, Jumlah Dokumen Kenaikan Gaji Berkala, Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat, Laporan Administrasi Kepegawaian SKP	Dokumen		9	9	9			
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		20	20	20			
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		90	90	91			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	Jenis		8	8	8			
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis		1	1	1			
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tahun		1	1	1			
				05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tahun		1	1	1			
				06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis		2	2	2			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	buku		30	30	0			
				09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		12	12	12			
				10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Tahun		1	1	1			
				11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tahun		1	1	1			
			2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	Jenis Pelayanan		5	3	3			

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan jabatan	unit		1					
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional lapangan	unit		5					
				05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit		36	52	10			
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		73	92	17			
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tetap lainnya yang disediakan	unit		41	14	16			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
											REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2		3		4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jenis Pelayanan		3	3	3				
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tahun		1	1	1				
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Bulan		12	12	12				
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Bulan		12	12	12				
			2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah		Jenis Pelayanan		3	3	3				

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		56	32	32			
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tahun		1	1	1			
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Gedung		3	3	3			
06	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%					99.75	99.75	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I- IV	%					100	100	100
							Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	%					71.94	71.94	100
				01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan					4	4	100
				02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan					83	83	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan					2	2	100
				04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan					436	436	100
				05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan					234	234	100
				06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan					40	40	100
				07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen					1	1	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%					89.66	89.66	100
				01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan					1	1	100
				02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan					12	12	100
06	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	%					91	91	100
						Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	Level					3	3	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”	%					48.61	48.61	100
			2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	%					100	100	100
							Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	%					91.67	91.67	100
				01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi					4	4	100
				02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusunn	rekomendasi					13	13	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			2.02		Kegiatan Pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	%					48.61	48.61	100
						Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	%					81	81	100
				01	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	PD					76	76	100
				02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan					4	4	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				03	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD					24	24	100
06	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin					75.40	75.40	100
			2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang berkualitas	%					100	100	100
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok					3	3	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dok					1	1	100
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dok					1	1	100
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dok					1	1	100
				05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dok					1	1	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					3	3	100
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					4	4	100
			2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%					98	98	100
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan					96	96	100
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen					49	49	100

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
				04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					1	1	100
				05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1	1	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					14	14	100
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					1	1	100
			2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%					100	100	100
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					4	4	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					15	15	100
			2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%					100	100	100
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket					3	3	100
				03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					9	9	100
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					29	29	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang					91	91	100
			2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%					100	100	100
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1	1	100
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					1	1	100
				03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1	1	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					1	1	100
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	1	100
				09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1	1	100
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1	1	100
			2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%					100	100	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit					3	3	100
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					6	6	100
				07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit					44	44	100
				09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	1	100
			2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%					100	100	100
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					1	1	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	1	100
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	1	
			2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%					100	100	100
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					33	33	100

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					85	85	100
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3	3	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM)/ Standar Nasional untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Muatan Lokal, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Penunjang dengan bidang urusan Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Bogor, meliputi aspek penilaian pada tataran pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat didalamnya.

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2024

URUSAN / UNSUR : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	TUJUAN								
	Terwujudnya Pengawasan Intern Yang Efektif dan Profesional Dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Terpercaya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Baik						

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP}	Level		3	3	2			
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level					3	2	66.67
	SASARAN								
	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	Level	3						
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level	3						

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level		3	3	3			
	Level Maturitas Resiko	Level		1	1	2			
	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level					3	3	100.00
	Meningkatnya Maturity Manajemen Resiko	Level					3	2	66.67
	Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level					2	2	100.00

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi	Poin					17.90	17.90	100.00
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah	Poin					82.45	82.45	100.00

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.2 terlihat bahwa indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bogor sebagian besar sudah tercapai dengan rata-rata tingkat capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2024 yaitu sebesar 88,89% dan secara keseluruhan, predikat kerja dapat dikatakan “Tinggi” serta target indikator tersebut dapat dikatakan “Baik” dengan capaiannya rata-rata > 75,00 – 89,99%.

Terdapat 4 (empat) indikator sasaran kinerja Inspektorat Tahun 2024, yaitu:

1. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
dimana sasaran bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pencapaian indikator tujuan Inspektorat yaitu “Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” adalah Level 2 atau tingkat capaian sebesar 66,67% dari target Level 3. Realisasi ini tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya adalah:
 - a. Perangkat Daerah masih belum mempedomani dan menyelenggarakan SPIP secara memadai;
 - b. Masih banyaknya kerugian Daerah yang belum dikembalikan ke Kas Daerah, terlihat dari masih besarnya temuan BPK yang belum ditindaklanjuti; dan
 - c. Adanya peraturan yang baru mengenai SPIP Terintegrasi (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021).
2. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
dimana sasaran ini merupakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah. Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sasaran ini memiliki target indikator kinerja Level Kapabilitas APIP level 3. Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.09.03/LHP-380/PW10/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024, realisasi kapabilitas APIP Kabupaten Bogor mendapatkan Skor : 3,405 (Level 3) atau disebut Integrated. Level Kapabilitas APIP Level 3 disebut Integrated,

menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, realisasi sasaran ini sesuai dengan target yang diinginkan dimana target pada Tahun 2024 yaitu Level 3.

3. Level Maturitas Manajemen Risiko, dimana Target Maturitas Manajemen Risiko Kabupaten Bogor berada pada Level 3. Berdasarkan hasil penilaian dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan LHE BPKP Nomor: PE.09.03/LHP-787/PW10/3.2/2024, realisasi nilai maturitas manajemen risiko Kabupaten Bogor adalah sebesar 2,869 poin atau berada pada Level 2 atau tingkat capaian sebesar 66,67% dari target sasaran yang sudah ditetapkan yaitu Level 3. Realisasi ini tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa faktor yaitu Kualitas dan Kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawabnya; dan Sarana & Prasarana yang Belum Memadai.
4. Meningkatnya Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dimana target Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Kabupaten Bogor berada pada Level 2. Berdasarkan hasil penilaian dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan LHE BPKP Nomor: PE.09.03/LHP-787/PW10/3.2/2024, realisasi nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Bogor yaitu 2,694 poin atau tingkat capaian sebesar 100% dari level yang ditetapkan yaitu Level 2 dan dapat dikatakan "Tercapai".

Adapun capaian program Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, Program tersebut dilaksanakan oleh Irban I, II, III, IV dan V dengan indikator sasaran (*outcome*) adalah "Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan". Tingkat Capaian Kinerja program ini pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan Tingkat Capaian Anggaran sebesar 96,30% dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Dimana dari target 813 dokumen hasil pengawasan yang direkomendasikan sudah ditindaklanjuti semuanya. Capaian indikator kinerja pada sasaran Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2024 juga telah memenuhi target akhir periode Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 yaitu sebesar 100%.

- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, Program tersebut dilaksanakan oleh Irban I,II,III, IV dan V dengan indikator sasaran (*outcome*) adalah “Persentase pendampingan dan asistensi yang dapat diselesaikan”. Tingkat Capaian Kinerja program ini pada Tahun 2024 sebesar 100% dengan Tingkat Capaian Anggaran sebesar 92,94 % dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Dimana dari target 121 dokumen kebijakan teknis dan hasil evaluasi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dapat diselesaikan semua. Capaian indikator kinerja pada sasaran Tersedianya Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pendampingan dan Asistensi Pengawasan Tahun 2024 juga telah memenuhi target akhir periode Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 yaitu 100%.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 kegiatan 36 Sub Kegiatan, Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dengan indikator sasaran (*outcome*) adalah “Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Inspektorat)”. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan dilaporkan dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja dari indikator ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan Tingkat Capaian Anggaran sebesar 98,29% dengan kategori sangat baik.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor selama tahun anggaran 2024, bahwa hampir seluruh objek pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor masih memerlukan banyak pembenahan dan perbaikan. Hal tersebut terlihat pada hasil-hasil pengawasan baik yang berbentuk pemeriksaan ataupun monitoring dan evaluasi yang menunjukkan adanya temuan/permasalahan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bogor tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kelemahan-kelemahan yang terjadi disebabkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada tiap-tiap satuan kerja belum berjalan dengan baik. Pengendalian intern perlu dilakukan secara dini untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Selain itu pengendalian intern yang baik akan membantu setiap satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain permasalahan diatas, terdapat permasalahan kaitan level maturitas manajemen risiko. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab ketika nilai maturitas manajemen risiko tidak mencapai target yang ditetapkan, salah duanya yaitu belum terintegrasinya sistem manajemen risiko dan SDM belum kompeten dalam manajemen risiko. Perencanaan strategis dan penganggaran harus mengacu pada *risk register* sehingga manajemen risiko tidak hanya menjadi dokumen pelengkap melainkan menjadi alat manajemen yang aktif.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat adalah sebagai berikut:

- Tantangan Internal

1. Terbatasnya SDM yang Kompeten, dikarenakan jumlah auditor dan pengawas fungsional belum sebanding dengan cakupan pengawasan di seluruh Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan, dan desa.
2. Keterbatasan Anggaran, alokasi anggaran pengawasan dan pembinaan tidak sebanding dengan beban kerja dan jumlah entitas yang diawasi (36 Perangkat Daerah, 40 Kecamatan, 416 Desa dan 19 Kelurahan).
3. Belum Optimalnya Implementasi Manajemen Risiko, dimana Inspektorat kesulitan menjadikan pendekatan berbasis risiko sebagai dasar pengawasan dan pembinaan.
4. Kapasitas Teknologi dan Digitalisasi Masih Rendah, belum ada sistem informasi pengawasan terpadu yang mendukung proses pelaporan temuan, monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan *risk-based* audit serta pelayanan pengaduan masyarakat masih cenderung manual atau semi digital.

- Tantangan Eksternal

1. Rendahnya Kepatuhan PD terhadap Rekomendasi Pengawasan.
Banyak Perangkat Daerah yang lambat dalam menindaklanjuti hasil audit atau reviu. Tindak lanjut terhadap LHP BPK, BPKP, maupun Inspektorat sering tidak tepat waktu atau tidak tuntas.
2. Masih Lemahnya Budaya Integritas di Lingkungan Pemda
Kasus penyimpangan dan pelanggaran etika belum sepenuhnya berkurang. Inspektorat sering dianggap sebagai “pemeriksa” bukan “mitra konsultatif” oleh PD.

3. Tuntutan Masyarakat terhadap Akuntabilitas Meningkat.

Masyarakat semakin kritis terhadap penggunaan anggaran dan pelayanan publik, termasuk menuntut transparansi pengawasan dengan ekspektasi terhadap penanganan aduan yang cepat dan tuntas meningkat.

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan melalui diklat, Bimtek fungsional dan substantive yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, BPK, BPKP dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga Inspektorat dapat mengakses pendampingan teknis dan pelatihan dari BPKP terkait manajemen risiko, SPIP, dan kapabilitas APIP serta dapat berkolaborasi dengan KPK dalam penguatan zona integritas dan pengendalian gratifikasi.
- b. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan, dengan klasifikasi sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah, diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), dan diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- c. Perkembangan Teknologi Digital, mengembangkan layanan pengawasan digital seperti:
 - E-reviu (dokumen perencanaan dan keuangan)
 - E-TLHP (tindak lanjut hasil pemeriksaan)
 - Whistleblowing System (WBS)
 - E-konsultasi dan pelaporan risiko online

- d. Paradigma tuntutan masyarakat di era otonomi daerah yang telah diakomodir kedalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah pula meningkatkan peran Inspektorat/APIP dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah.
- e. Menjalin koordinasi dengan setiap PD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dalam bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Bogor tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten Bogor (*welfare state*).

Berdasarkan hasil analisis, berikut permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bogor:

1. Kesenjangan antara Tuntutan Peran Strategis dan Kapasitas Nyata;
Inspektorat dituntut menjadi mitra strategis PD dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), namun masih terkendala keterbatasan SDM, anggaran, dan sistem pendukung.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP Terintegrasi (SPIP, Manajemen Risiko, Kapabilitas APIP, IEPK);
3. Manajemen Risiko Belum Menjadi Budaya Organisasi;
Meskipun sudah ada kebijakan nasional dan peluang penguatan, namun implementasi manajemen risiko di PD masih lemah dan belum terintegrasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

4. Belum Memaksimalkan Digitalisasi dan Inovasi Layanan.

Di tengah peluang teknologi yang besar, Inspektorat belum memaksimalkan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan layanan publik yang modern, seperti pelaporan digital.

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap tantangan, peluang, dan permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bogor, berikut adalah kesimpulan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan kerja (Renja) Inspektorat adalah:

1. Terbatasnya Kapasitas SDM Pengawasan untuk Menjangkau Seluruh Entitas Objek Pengawasan.
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
3. Rendahnya Tingkat Pemanfaatan Fungsi Konsultasi oleh PD.
4. Belum Memaksimalkan Digitalisasi kaitan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja PD

Telaahan terhadap rancangan awal Renja PD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Review terhadap rancangan awal Renja PD, meliputi aspek identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan untuk PD yang bersangkutan, Proses perbandingan antara Rancangan Awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan perlu dilakukan secara komprehensif dan objektif. Alasan utama dilakukannya perbandingan antara usulan Ranwal Renja PD dengan keluaran hasil analisis kebutuhan, yaitu:

1. Keselarasan Kebijakan

Memastikan bahwa setiap program dalam Ranwal Renja PD selaras dengan visi dan misi RPJMD.

2. Relevansi Kebutuhan Aktual

3. Efisiensi Anggaran

Memastikan penggunaan anggaran optimal, dengan menghindari duplikasi kegiatan dan pemborosan dengan cara menggunakan *program-based* atau *performance-based budgeting* agar anggaran benar-benar mengikuti program yang memberikan dampak.

Berdasarkan perbandingan antara Rancangan Awal Renja PD dengan hasil analisis kebutuhan, beberapa temuan mungkin dapat diidentifikasi, yaitu adanya perubahan / review terhadap program dan rancangan awal Renja PD dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Tahun 2026 antara lain disebabkan karena :

- a. Adanya beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan yang baru.
- b. Pelaksanaan SIPD-RI yang belum stabil dan masih berubah ubah di dalam aplikasinya.
- c. Adanya penambahan sub kegiatan baru sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Tahun 2026.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6123 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, maka :

1. Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan, asistensi, konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
2. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*). Untuk melakukan reviu terhadap rancangan awal Renja PD Tahun 2024 maka perlu dilihat kembali Permendagri No 19 Tahun 2019 yaitu nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian output, outcome dan anggaran serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 terkait pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Review rancangan awal rencana kerja Inspektorat dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal rencana kerja tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Tahun 2026. Untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan dalam penganggaran tahun 2026, yang berakibat terdapat beberapa perubahan indikator, target capaian serta pagu indikatif sebagaimana hasil review yang disajikan dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026

URUSAN / UNSUR : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : INSPEKTORAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	100	3,269,901,860	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	99.78	3.231.997.103	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100	2,731,841,510	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100	2.830.265.995	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	%	76,55				Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	%	76.55		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	130,407,197	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	140.325.513	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	83	911,858,925	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	83	1.017.244.293	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	161,642,074	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	176.636.296	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	436	440,959,590	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	436	390.016.948	
	Pengawasan Desa	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	234	907,321,538	Pengawasan Desa	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	234	910.723.808	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Bogor	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	84,380,186	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Bogor	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	103.825.322	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	95,272,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	91.493.815	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	95	538,060,350	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	95	401.731.108	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	20	33,182,100	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	53.536.245	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	34	504,878,250	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	348.194.863	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	%	95	2,118,377,274	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/ Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	%	93.5	660.838.432	
			Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah hasil Penilaian Mandiri	Level	3				Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah hasil Penilaian Mandiri	Level	3		
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”	%	83.33				Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”	%	73,61		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100	303,047,208	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100	260.580.043	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	%	93.50				Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	%	93.50		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi	4	195,314,575	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomend asi	4	167,970,059	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi	13	107,732,633	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomend asi	13	92,609,984	
	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	83.33	1,815,330,066	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	73,61	400.258.389	
			Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	%	83				Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	%	83		

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	76	61,204,518	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	76	74.820.686	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Bogor	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	1,722,149,510	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Bogor	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	278.990.053	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	31,976,038	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	46.447.650	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	Poin	80	80,109,760,667	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	65.321.985.024	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	77	784,127,935	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat	%	100	794.059.650	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	165,475,369	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	173,519,700	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	29,151,350	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	55,069,950	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	26,062,076	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	52,413,300	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	28,325,133	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	54,359,250	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	26,348,771	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	51,448,925	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	66,993,998	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	87,614,425	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	413,758,215	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	265,543,025	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	28,013,023	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	54,091,075	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	%	100	44,019,417,744	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah	%	98.50	41.276.399.565	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase SPM yang Menjadi SPPD Tepat Waktu	%	100								
			Persentase Kegiatan Yang Terpenuhi Kewajiban Pembayaranannya	%	100								
			Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	%	100								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	115	43,727,765,208	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	112	40,860,155,290	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	88,743,919	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	106,319,575	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	66,180,775	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	86,879,950	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	33,219,418	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	62,209,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	75,367,550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	105,387,525	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	28,140,874	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	55,447,925	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	56,103,944	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	116,004,800	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	34,928,556	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	64,839,703	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	21,175,388	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	51,165,097	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	1,706,038,309	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	1,471,177,422	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kel.Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	113,754,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kel.Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	127,818,750	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	201,409,700	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	234,282,672	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel.Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	338,078,004	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel.Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	368,076,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	115	1,052,796,605	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	115	741,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100	1,161,866,227	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100	1,171,750,447	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	38,449,527	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	62,991,420	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	138,821,955	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	149,037,066	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	49,912,645	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	72,920,037	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel.Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	68,651,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel.Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	89,004,270	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	312,975,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	354,225,000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	509,683,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	395,245,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	43,372,600	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	48,327,654	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100	29,997,627,995	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100	17,824,752,674	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3	1,042,976,380	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	904,024,101	
	Pengadaan Mebel	Kel.Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	135,305,555	Pengadaan Mebel	Kel.Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	147,948,975	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	349,030,575	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34	326,568,579	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	211,815,485	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	208,264,625	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	28,258,500,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	16,237,946,394	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1,443,892,513	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1,366,956,966	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	23,350,750	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	45,478,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	393,960,067	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	369,986,266	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,026,581,696	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	951,492,700	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100	940,686,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100	1,300,883,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	383,743,500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	453,930,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	163,012,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	216	193,012,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	198,930,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	328,941,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	195,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	325,000,000	
	Jumlah Anggaran					85,498,039,801						69,219,820,559	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Kabupaten Bogor menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor lainnya yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian dan pengamatan, atau yang sering diistilahkan dengan penjaringan aspirasi masyarakat, yang kemudian bermuara pada proses input usulan program dan kegiatan melalui Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Proses perencanaan tahunan tidak terlepas dari upaya mengakomodir usulan kebutuhan prioritas masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan Tupoksi. Berdasarkan ketentuan, proses perencanaan tahun 2026 diarahkan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur perencanaan sebagai berikut :

1. Partisipatif, yang terbagi 2 (dua) yaitu melalui kegiatan musrenbang RKPD Kabupaten Bogor di kecamatan dan kabupaten serta Forum Renja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten; dan
2. Politis, yaitu melalui kegiatan penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD melalui Reses di daerah pemilihan dan janji Bupati.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan fokus pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan dimaksud diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD; dan
3. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Tahap Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2026 sudah dilaksanakannya tahapan pelaksanaan pengumpulan usulan dari seluruh pemangku kepentingan dimana untuk perencanaan Tahun 2026 hanya dilakukan melalui Forum Perangkat

Daerah maupun usulan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penjangkaran informasi usulan melalui kedua kegiatan diatas, sampai saat ini semua usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen Renja Inspektorat Tahun 2026 ini hanya berasal dari usulan teknokratik yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 untuk menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026. Secara lengkap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	99.78	%	Teknokratik
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I- IV	100	%	Teknokratik
			Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	76.55	%	Teknokratik
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Laporan	Teknokratik
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	83	Laporan	Teknokratik
	Reviu Laporan Kinerja	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Reviu Laporan Keuangan	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	436	Laporan	Teknokratik
	Pengawasan Desa	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	234	Laporan	Teknokratik
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab.Bogor	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	40	Kesepakatan	Teknokratik
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab.Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1	Dokumen	Teknokratik
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	95	%	Teknokratik
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	Teknokratik
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab.Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	Teknokratik
						Teknokratik
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	93.5	%	Teknokratik
			Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah hasil Penilaian Mandiri	3	Level	Teknokratik
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”	73,61	%	Teknokratik
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	100	%	Teknokratik
			Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	93.5	%	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	Rekomendasi	Teknokratik
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab.Bogor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	13	Rekomendasi	Teknokratik
	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	73,61	%	Teknokratik
			Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	83	%	Teknokratik
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	76	PD	Teknokratik
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab.Bogor	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kegiatan	Teknokratik
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab.Bogor	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24	PD	Teknokratik
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	Poin	Teknokratik
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat	100	Poin	Teknokratik
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	Teknokratik
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	Teknokratik
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	Teknokratik
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah	98.5	%	Teknokratik
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	Orang/Bulan	Teknokratik
	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49	Dokumen	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Teknokratik
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	Teknokratik
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	Teknokratik
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	Teknokratik
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	Teknokratik
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Laporan	Teknokratik
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	100	%	Teknokratik
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kel.Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	Teknokratik
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	Dokumen	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel.Tengah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	Teknokratik
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel.Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115	Orang	Teknokratik
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhi nya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	100	%	Teknokratik
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Teknokratik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Teknokratik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Teknokratik
	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Kel.Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Teknokratik
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Teknokratik
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Teknokratik
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kel.Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Teknokratik
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terpenuhi nya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	100	%	Teknokratik
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Unit	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Mebel	Kel.Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	Teknokratik
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	Unit	Teknokratik
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	Unit	Teknokratik
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Unit	Teknokratik
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Teknokratik
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Teknokratik
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Teknokratik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel.Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Teknokratik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100	%	Teknokratik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel.Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	Unit	Teknokratik
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216	Unit	Teknokratik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	Teknokratik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel.Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Teknokratik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, memperhatikan pelaksanaan pembangunan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. Sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan perumusan, penetapan, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pengawasan.

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional (*asta cita*) yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bogor yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan” dengan visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu “Indonesia Emas 2045” dan misi RPJPN yaitu pembangunan berkelanjutan, inklusif dan tata kelola pemerintahan yang profesional. Adapun kaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat untuk mencapai visi, misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yaitu melalui fungsi pengawasan dan evaluasi, memastikan program nasional di daerah selaras dengan prioritas tersebut, seperti halnya pengawasan pelaksanaan program lingkungan (*green economy*) dan tata kelola adaptif yang menjadi misi nasional. Inspektorat juga berfungsi sebagai mediator agar pelaksanaan program mendekati target RPJPN Tahun 2025-2045 dengan memonitor porsi anggaran daerah dalam sektor strategis dan menilai capaian indikator.

Agar prioritas pembangunan nasional tersebut dapat dicapai, perlu dukungan program-program dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterkaitan program Inspektorat Kabupaten Bogor dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	99.78	%	3,231,997,103
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1. Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (%)	93.5	%	660.838.432
				2. Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri (level)	3	Level	
				3. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB” (%)	73,61	%	

Berdasarkan Tabel 3.1, Inspektorat Kabupaten Bogor mendukung 1 (satu) prioritas pembangunan nasional, yaitu **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan** didukung oleh 2 (dua) program utama Inspektorat dengan sasaran (outcome) yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja; dan
2. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah.

Sementara itu, kaitan dengan sinkornisasi dengan RPJPD Provinsi Jawa barat Tahun 2025-2045, Inspektorat berperan untuk memastikan integrasi visi dan misi di setiap perangkat daerah, audit kinerja dalam mewujudkan infrastruktur berkualitas, inovasi teknologi dan tata kelola pemerintahan berintegritas dan melakukan evaluasi reguler untuk menjaga program prioritas dilaksanakan secara akuntabel agar sejalan dengan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat yaitu “Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan” dengan arah prioritas pembangunan Jawa Barat yang berkaitan dengan Tupoksi Inspektorat tertuang pada Misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*” dengan program prioritas adalah Transformasi Birokrasi berbasis digital dan penguatan Good Governance, serta kerjasama daerah dan Internasional. Langkah strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat (Salapan Langkah) yang didukung dan sesuai tupoksi Inspektorat adalah Langkah Kasalapan yaitu Pembangunan Desa berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi, dengan tujuan untuk membentuk karakter birokrasi jujur, bersih, dan tulus melayani masyarakat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
	Misi ke-4 : Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	99.78	%	3,231,997,103
	Program Prioritas : Transformasi Birokrasi berbasis digital dan penguatan Good Governance, serta kerjasama daerah dan Internasional	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK (%)	93.5	%	660.838.432

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
			perangkat daerah	2. Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri (level)	3	Level	
				3. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB” (%)	73,61	%	

Sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi, Inspektorat Kabupaten Bogor turut berperan terhadap proses pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor khususnya RPJPD Kabupaten Bogor 2025-2045. Adapun peran Inspektorat antara lain:

1. Pengawasan Program Tahunan (RKPD), menjamin kegiatan PD sejalan dengan target indikator RPJPD.
2. Audit Fungsional terhadap penyusunan APBD, pencapaian output RPJPD, dan integrasi dengan RTRW.
3. Rekomendasi Perbaikan demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan di bidang pelayanan publik dan keuangan daerah.

Dukungan Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap priorotas dan arah kebijakan nasional, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan”, sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat, kegiatan yang mendukung diantaranya:

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu : bimbingan teknis pemeriksaan *investigative*, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*), bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.
- b. Kegiatan asistensi/pendampingan yaitu : penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.

- c. Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi, evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan *Whistle Blower System*, penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender dan pelayanan publik.
- e. Kegiatan pemeriksaan meliputi : pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.

Sebagaimana terlampir pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Dukungan Terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu : bimbingan teknis pemeriksaan investigative, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probitity advice), bimbingan teknis penerapan system manajemen risiko.	Irban I,II,III, IV dan V
	Kegiatan asistensi/pendampingan yaitu : penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah	Irban I,II,III, IV dan V
	Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa.	Irban I,II,III,dan IV

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
	Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan, Pemeriksa Keuangan,tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, danadesa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan Whistle Blower System, penanganan benturankepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelayanan publik .	Irbn I,II,III,IV dan V
	Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.	Irbn I,II,III,dan IV

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan perangkat daerah adalah apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahunan, sebagai implementasi dari sasaran daerah. Adapun sasaran perangkat daerah adalah implementasi tujuan tahunan perangkat daerah yang akan dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan, serta menghasilkan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Demi keselarasan arah pembangunan di tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipandu Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029, dirumuskan tujuan dan sasaran Inspektorat yang akan di capai sampai tahun 2026. Tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Bogor adalah **Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien**, dengan sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Bogor pada Tahun 2026 tercantum dalam Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Level
SASARAN	1.1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Level
		2. Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas Resiko (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Level
		3. Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Tingkat Efektifitas Pengendalian Korupsi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Level

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2026 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2025 mempunyai 3 Program, 12 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 3 Program yang terdiri dari 2 Program Utama yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Usulan pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2026 sebesar Rp. 67.634.109.694,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Bogor adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengawasan. Untuk lebih jelasnya Program, Kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Eselon II, III dan IV disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
INSPEKTUR	3	12	53	69.214.820.559
SEKRETARIAT	1	8	39	65.321.985.024
Subag Umum dan Kepegawain		6	25	23.251.525.809
Subag Keuangan		1	6	41.276.399.565
Subag Program dan Pelaporan		1	8	794.059.650
IRBAN	2	4	14	3.892.835.535

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

A. Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Rancangan Akhir Rencana kerja Inspektorat Tahun 2026 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri dari 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terbagi menjadi 12 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 69.214.820.559,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan 5 Inspektorat Pembantu (Itban) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Kabupaten Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan berbeda dengan Perangkat Daerah lain, dimana secara administrasi dan keuangan program utama dilaksanakan oleh sekretariat dan secara teknis dilaksanakan oleh seluruh Itban. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sasaran program ini adalah kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana kegiatan dengan indikatornya yaitu “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Internal Dan Eksternal yang Ditindaklanjuti” dimana target yang ingin dicapai sebesar 99,78%. Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, kegiatan pada program ini adalah:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Reviu Laporan Kinerja;

- 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal; dan
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Sasaran program ini adalah tersedianya kebijakan teknis, dan fasilitasi pendampingan dan asistensi pengawasan dengan beberapa indikator diantaranya adalah:
- Nilai Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK.
 - Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Hasil Penilaian Mandiri.
 - Presentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”.
- Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, kegiatan pada program ini adalah:
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; dan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 2) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 - 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Sasaran program ini adalah terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan indikatornya yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 100%. Dalam rangka mendukung sasaran tersebut, kegiatan pada program ini adalah:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; dan
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2026 yang saat ini juga dalam tahap penyusunan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terbagi menjadi 12 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 69.214.820.559,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sekretariat dan 5 Inspektorat Pembantu (Itban) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Kabupaten Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan berbeda dengan Perangkat Daerah lain, dimana secara administrasi dan keuangan program utama dilaksanakan oleh sekretariat dan secara teknis dilaksanakan oleh seluruh Itban. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

URUSAN /UNSUR
BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH

: UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
: INSPEKTORAT DAERAH
: INSPEKTORAT

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	99.78	3.231.997.103			99.79	2.906.777.159
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100	2.830.265.995			100	2.464.583.597
		Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	%	76.55				77.78	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	4	140.325.513	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	116,947,917
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	83	1.017.244.293	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80	810.573.786
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	176.636.296	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2	145,806,281
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	436	390.016.948	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	440	482.584.516
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	234	910.723.808	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	300	791.053.692
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	40	103.825.322	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40	81,818,205
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1	91.493.815	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	89,799,200

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	95	401.731.108			96	442.193.562
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	53.536.245	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	36,500,310
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	348.194.863	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	405,693,252
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	%	93.5	660.838.432			94,31	1.691.990.172
		Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah hasil Penilaian Mandiri	Level	3				3	

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”	%	73.61				80.56	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	%	100	260.580.043			100	333,351,929
		Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	%	93.5				94.31	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	167.970.059	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	214,846,033
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	13	92.609.984	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13	118,505,896
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	%	73.61	400.258.389			80.56	1.358.638.243

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nilai Capaian Area Pengawasan APIP pada MCP KPK	%	83				84	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	76	74,820,686	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	76	67,324,970
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	278,990,053	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	1,256,139,631
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	24	46,447,650	Kab.Bogor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24	35,173,642
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	65.321.985.024			BB	54.509.256.276

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat	%	100	794.059.650			100	635,540,729
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	173.519.700	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3	142,022,906
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	55.069.950	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	27,066,485
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	52.413.300	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	23,668,284
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	54.359.250	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	26.157.646

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	51.448.925	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	23,983,648
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	87.614.425	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3	68,693,398
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	265.543.025	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	298,134,037
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	54.091.075	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	25,814,325
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daaerah	%	98.5	41.276.399.565			98.6	43.219.3136.704

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	112	40.860.155.290	Kel.Tengah	Dana Alokasi Umum (DAU)	120	42,968,495,914
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	49	106.319.575	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49	72,618,311
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	86.879.950	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	67,798,853
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	62.209.300	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	26,541,360
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	105.387.525	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14	57,904,305

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	55.447.925	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	25,954,961
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	116.004.800			100	56.714.339
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	64.839.703	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4	33,421,412
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	15	51.165.097	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15	23,292,927
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	1.471.177.422			100	1,101,642,140
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	127.818.750	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	100,129,400

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	234.282.672	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9	171,550,670
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	368.076.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37	271,885,804
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	115	741.000.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120	558,076,266
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	100	1.171.750.447			100	843.052.850
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	62.991.420	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	37,294,480
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	149.037.066	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	102,704,150

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	72.920.037	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	44,903,910
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	89.004.270	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	65,516,100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	354.225.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	244,272,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	395.245.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	310,651,850
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	48.327.654	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	37,709,860
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	100	17.824.752.674			100	6.833.040.796
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	904.024.101	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3	747.274.018

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	147.948.975	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	118,836,111
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	34	326.568.579	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12	233,933,633
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	208.264.625	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6	132,997,034
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	16.237.946.394	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	5.600.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.366.956.966			100	1.038.281.765
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	45.478.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	25,685,825
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	369.986.266	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	283,356,074

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	951.492.700	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	729.239.866
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100	1.300.883.500			100	781.669.953
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	453.930.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39	299.033.203
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	216	163.012.500	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	162	149,313,750
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	328.941.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2	168,823,000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	325.000.000	Kel.Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	164,500,000
Jumlah Anggaran					69.214.820.559				59.108.023.606

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Inspektorat Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Inspektorat Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Inspektorat 2025-2029, maka Renja Inspektorat akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Inspektorat wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.



Rumus Hitung Indikator Kinerja Tahun 2026
Dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2026

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
	Tujuan	Tujuan	Tujuan	
1	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	
	Sasaran	Sasaran	Sasaran	
1.1	Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Tingkat Maturitas Resiko (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	
		Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Tingkat Efektifitas Pengendalian Korupsi (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	
1.2	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah	Total Nilai Persepsi -----100 Unsur Total yang Terisi	
	Outcome (program)	Outcome (program)	Outcome (program)	
1.1.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan keuangan dan kinerja	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP internal untuk pemeriksaan kegiatan tahun sebelumnya (T-1) dan eksternal (BPK RI) ----- x 100% Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal (BPK RI) yang terbit	

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
1.1.2	Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK/Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK	Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dilakukan oleh KPK RI	
		Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah hasil Penilaian Mandiri	Hasil penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bogor oleh Inspektorat	
		Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	Jumlah Perangkat Daerah yang berperingkat nilai BB ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	
1.2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian dari Inspektorat	
	Grand Output (kegiatan)	Grand Output (kegiatan)	Grand Output (kegiatan)	
1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan Internal	Persentase pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan BUMD yang terlaksana sesuai dengan PKPT di Wilayah Kerja Itban I-IV	Jumlah perangkat daerah dan BUMD yang terbina dan terawasi dibagi dengan jumlah rencana perangkat daerah dan BUMD yang akan dibina dan diawasi sesuai PKPT pada wilayah kerja Itban I-IV x 100%	
2	Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang sesuai dengan rekomendasi	Jumlah tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) dengan status sesuai yang diselesaikan dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI) X 100%	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Terindikasi Kerugian negara/daerah	Persentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan masyarakat yang diselesaikan ----- x 100% Jumlah Pengaduan masyarakat yang masuk	
4	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan SPIP	Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada Wilayah Kerja Itban I-IV	Jumlah Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP pada wilayah kerja Itban I-IV ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah pada wilayah kerja Itban I-IV	

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
5	Meningkatnya Kepatuhan ASN dalam pemenuhan LHKASN	Persentase ASN yang memenuhi LHKASN	Jumlah PNS yang sudah menyampaikan LHKASN melalui LHKPN dan SPT Tahunan ----- x 100% Jumlah PNS yang wajib melaporkan LHKASN	
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB di Wilayah Kerja Itban I-IV	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya minimal BB berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat pada wilayah kerja Itban I-IV ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah pada wilayah kerja Itban I-IV	
7	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas	Nilai Capaian Area Pengawasan APiP pada MCP KPK	Penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dilakukan oleh KPK RI	
8	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang berkualitas	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang selesai disusun ----- 100 Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat yang akan disusun	
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja ----- 100 Jumlah Anggaran	
10	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah yang Tercatat ----- 100 Jumlah Barang Milik Daerah	
11	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani Tepat Waktu ----- 100 Layanan Administrasi Kepegawaian yang Tertangani	
12	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi----- ----- x 100Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Ditargetkan	

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
13	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan ----- 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana	
14	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi ----- 100 Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
15	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara ----- 100 Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki	
	Output (sub kegiatan)	Output (sub kegiatan)	Output (sub kegiatan)	
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun pada tahun ke-n	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun pada tahun ke-n	
3	Terlaksananya Reviu laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Reviu laporan kinerja yang disusun pada tahun ke-n	
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang disusun pada tahun ke-n	
5	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang disusun pada tahun ke-n	
6	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Data Tunggal : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk pada tahun ke-n	
7	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Data Tunggal : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang disusun pada tahun ke-n	
8	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Data Tunggal : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani pada tahun ke-n	

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
9	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang disusun pada tahun ke-n	
10	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Data Tunggal : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun pada tahun ke-n	
11	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Data Tunggal : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun pada tahun ke-n	
12	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Data Tunggal : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun ke-n	
13	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Data Tunggal : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan pada tahun ke-n	
14	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Data Tunggal : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun ke-n	
15	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data Tunggal : Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun pada tahun ke-n	
16	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Data Tunggal : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
17	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Data Tunggal : Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
18	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Data Tunggal : Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun pada tahun ke-n	

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
19	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Data Tunggal : Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
20	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data Tunggal : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
21	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data Tunggal : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun pada tahun ke-n	
22	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Data Tunggal : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang disusun pada tahun ke-n	
23	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Data Tunggal : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun ke-n	
24	Tersedianya dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Data Tunggal : Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
25	Tersedianya dokumen akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Data Tunggal : Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
26	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Data Tunggal : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
27	Tersedianya dokumen laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Data Tunggal : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun pada tahun ke-n	

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
28	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Data Tunggal : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun pada tahun ke-n	
29	Tersedianya dokumen laporan perencanaan BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Data Tunggal : Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
30	Tersedianya dokumen laporan administrasi barang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Data Tunggal : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
31	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Data Tunggal : Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia pada tahun ke-n	
32	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data Tunggal : Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun pada tahun ke-n	
33	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Data Tunggal : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun ke-n	
34	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Data Tunggal : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun ke-n	
35	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun ke-n	
36	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun ke-n	
37	Terpenuhinya kebutuhan logistik pendukung Fasilitas Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun ke-n	
38	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun ke-n	
39	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Data Tunggal : Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang disusun pada tahun ke-n	

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
40	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
41	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Data Tunggal : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun pada tahun ke-n	
42	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Data Tunggal : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun ke-n	
43	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah paket mebel yang Disediakan pada tahun ke-n	
44	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun ke-n	
45	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun ke-n	
46	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun ke-n	
47	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun ke-n	
48	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun pada tahun ke-n	
49	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Data Tunggal : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun pada tahun ke-n	
50	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Data Tunggal : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun ke-n	
51	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Data Tunggal : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun ke-n	

NO	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
52	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Data Tunggal : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun ke- n	
53	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Data Tunggal : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun ke- n	